

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

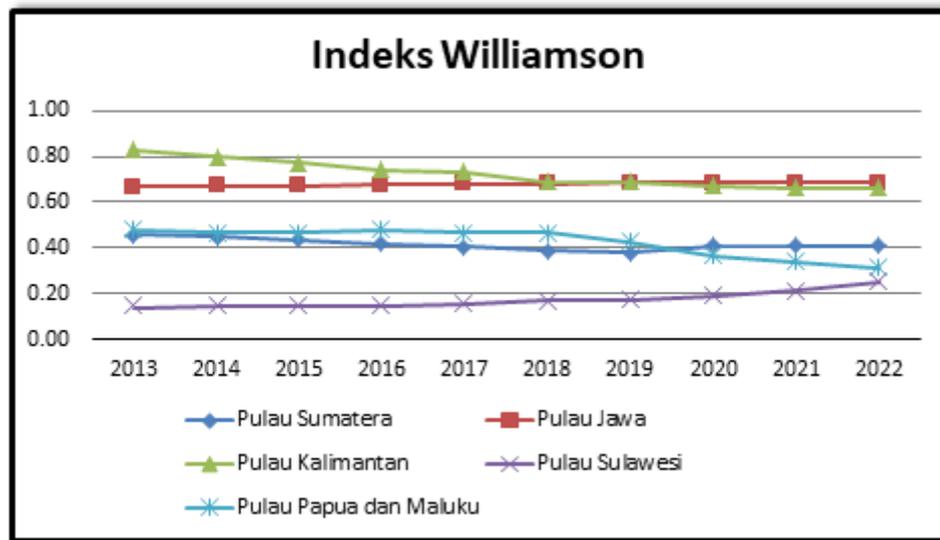
Mengoptimalkan kehidupan serta kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.. Pembangunan dianggap sebagai tindakan penting bagi setiap negara, karena pembangunan ekonomi berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tingkat kesejahteraan rakyat dapat diukur dengan peningkatan pendapatan nasional setiap tahun atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat tercermin berdasarkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan berhubungan erat dengan pembangunan digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Menurut teori yang disampaikan oleh ekonom Kuznet, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan dalam kurun waktu yang lama dalam produktivitas negara untuk menawarkan kepada masyarakatnya beragam produk ekonomi yang semakin beragam. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan institusional yang penting, dan pergeseran ideologi yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan peningkatan kesejahteraan manusia merupakan hasil ideal dari pembangunan ekonomi. Namun, pada kenyataannya ketimpangan akan muncul sebagai dampak laju pertumbuhan ekonomi (Santoso & Mukhlis, 2021).

Indonesia mempunyai pulau-pulau terbesar diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, mencakup 25 provinsi dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Meskipun, program pembangunan nasional yang sama diimplementasikan di Indonesia, namun setiap wilayah tetap memiliki

karateristik berbeda dalam proses pembangunan.. Perbedaan ini juga memengaruhi kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, di setiap wilayah terdapat wilayah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Fenomena ketimpangan pembangunan pulau yang terjadi pada tahap pembangunan ekonomi memiliki banyak tantangan serta masalah yang harus diatasi, termasuk Indonesia. Ketimpangan wilayah muncul sebagai hasil dari kesenjangan pemerataan dalam upaya pembangunan ekonomi. Prinsip mencapai pembangunan inklusif, yang dimana tidak meninggalkan satu orangpun (*leave no behind*) merupakan bagian agenda pembangunan global hingga 2030 dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah pengurangan ketidakmerataan. Pembangunan harus dilakukan secara merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Akantetapi, yang kita temui masih terdapat masalah ketimpangan di tengah-tengah masyarakat.

Dampak dari ketimpangan berupa positif dan negatif. Dampak positif ketimpangan termasuk peningkatan persaingan antarwilayah untuk meningkatkan perekonomian. Namun, dampak negatifnya meliputi stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah, ekonomu yang tidak efisien, dan ketimpangan yang tinggi (Todaro & Smith, 2004). Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan antarwilayah dapat diukur menggunakan Indeks Williamson, yang merupakan pendekatan berdasarkan PDRB per kapita. Berikut adalah Indeks Williamson untuk selama 10 tahun terakhir.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Diolah Penulis

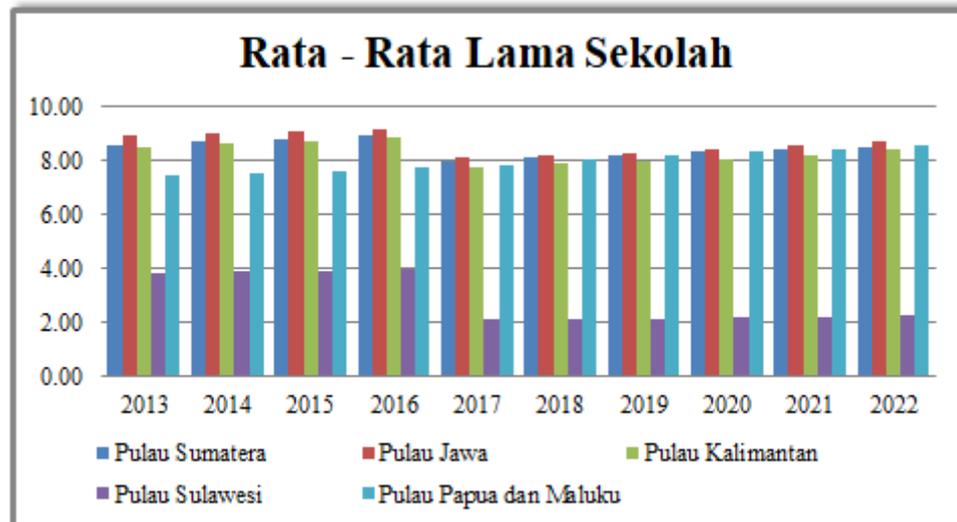
Gambar 1. 1 Indeks Williamson 5 Pulau Tahun 2013-2022

Data menunjukkan bahwa ketimpangan pulau-pulau di Indonesia mengalami fluktuatif. Pulau Sumatera dan Papua tergolong ketimpangan sedang. Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir sedangkan pulau Kalimantan cenderung mengalami penurunan, namun kedua pulau tersebut tergolong ketimpangan sangat tinggi sebab angka ketimpangannya melebihi 0,5 yang mana mendekati angka 1 dan menandakan bahwa semakin melebarnya ketimpangan pembangunan di pulau tersebut. Sedangkan pulau Sulawesi masuk dalam kategori ketimpangan mendekati merata tetapi mengalami tren meningkat. Hasil penelitian Sjafrizal pada tahun 2012 tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia menghitung dan meneliti pengaruh keberadaan ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan. Hasil menunjukkan dibandingkan dengan provinsi lain, pengaruh ibu kota Jakarta terhadap ketimpangan cukup besar. Hipotesis neo-klasik mengatakan bahwa kecenderungan peningkatan ketimpangan pembangunan terjadi saat pembangunan dimulai dan menjangkau puncak, lalu akan menurun seiring berjalannya

waktu. Ketimpangan pembangunan antarwilayah pada tahap awal pembangunan tidak secara otomatis menurun, namun terkadang malah meningkat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey G. Williamson tahun 1966.

Pemanfaatan sumber daya yang ada merupakan proses memperbaiki pembangunan wilayah yang terbelakang (Aprianoor & Muktiali, 2015). Untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah terbelakang, pembangunan orang perorangan harus ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (2022), mengatakan bahwa pembangunan manusia adalah upaya untuk membuat masyarakat mempunyai banyak opsi dalam kehidupan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat bergantung pada taraf sumber daya manusia di setiap wilayah; kualitas individu yang lebih baik, maka semakin baik kesejahteraan masyarakat yang diharapkan (Todaro & Smith, 2004). Menurut The World Bank (2016), salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disebut pemerataan pembangunan bermaksud untuk mewujudkan kesetaraan melalui perbaikan sistem pendidikan. Kualitas SDM yang lebih baik tidak terlepas dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, studi Nurhuda, Muluk, & Prasetyo (2013) menemukan peningkatan pendidikan disuatu wilayah merupakan kebijakan meningkatkan taraf individu perorangan. Kualitas pendidikan yang meningkat dapat meningkatkan kualitas hidup, dan nantinya akan mengurangi ketimpangan pembangunan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi akan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dengan kemampuan, tekad, dan efisiensi yang optimal dalam setiap langkah proses perekonomian.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data Diolah

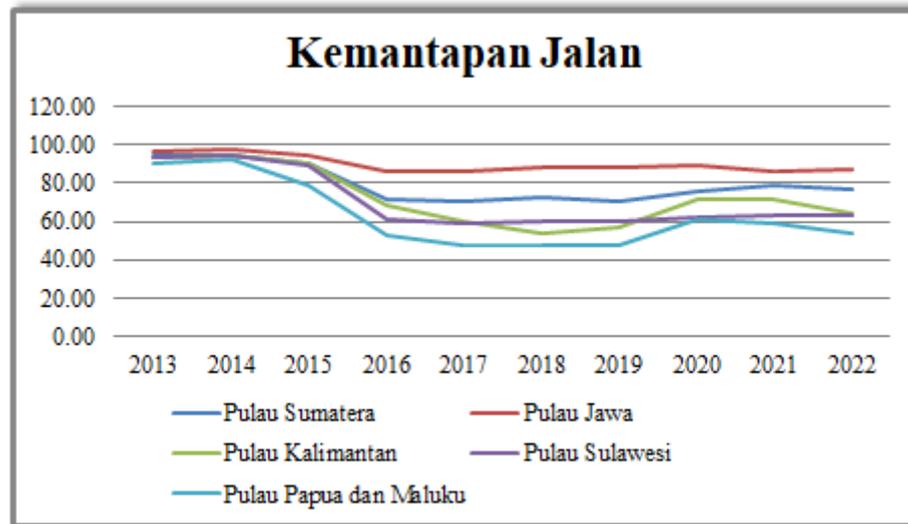
Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah 5 Pulau Tahun 2013-2022

Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di pulau-pulau memang cenderung meningkat, tetapi rata-rata di pulau Sulawesi masih lebih rendah di antara ketiga pulau lainnya, maka ini menunjukkan ketidakmerataan dalam pendidikan di pulau-pulau tersebut. Pendidikan memegang peran penting terhadap ketimpangan pembangunan. Dalam pembangunan, sumber daya manusia berperan dimana jika tingkat pendidikan yang didapatkan merata maka akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Melalui peningkatan tingkat pendidikan, pulau yang kurang maju dapat mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi sehingga akan mendorong kesetaraan dalam pembangunan. Keunggulan individu terlihat dari tingkat pendidikannya, wilayah yang rendah tingkat pendidikannya akan sulit untuk mencapai pembangunan yang merata.

Perbedaan infrastruktur adalah komponen tambahan yang memengaruhi perkembangan ketimpangan. Infrastruktur berperan penting mendorong kemajuan ekonomi suatu wilayah, karena kemajuan ekonomi membutuhkan kesiapan sarana dan

prasarana yang layak. Sehingga kemajuan infrastruktur dan kemajuan ekonomi saling berkaitan satu sama lain (Calderon & Sermen, 2004). Ketidaksetaraan dalam pembangunan infrastruktur nantinya akan memengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketimpangan kesejahteraan (Sukwika, 2018).

Infrastruktur yang berkualitas di suatu wilayah akan memudahkan masyarakat mendapat akses terhadap berbagai layanan. Salah satu diantaranya yaitu infrastruktur jalan yang memiliki peran krusial untuk mendorong pertumbuhan. Keberadaan jalan berkualitas memfasilitasi pemasaran barang dan mobilitas penduduk, yang mengurangi tarif pemasaran, serta mendukung daya saing harga di pasar. Efisiensi, kemudahan mobilitas barang dan jasa serta peningkatan nilai ekonomi akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang ideal. Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas suatu wilayah adalah ketersediaan infrastruktur. Menurut De dan Ghosh (2005), pentingnya pembangunan sarana dan prasarana terletak pada kenyataan bahwa hambatan yang dihadapi suatu wilayah lebih bersifat ekonomi dibandingkan masalah kondisi geografis yaitu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat yang optimal. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur (Nurmandi, 2017). Infrastruktur seperti jalan memudahkan masyarakat untuk melakukan bisnis. Kualitas serta jumlah panjang jalan yang terhubung antarwilayah akan memperlancar transportasi darat. Kualitas jalan dapat dilihat melalui grafik kemantapan jalan dibawah ini.

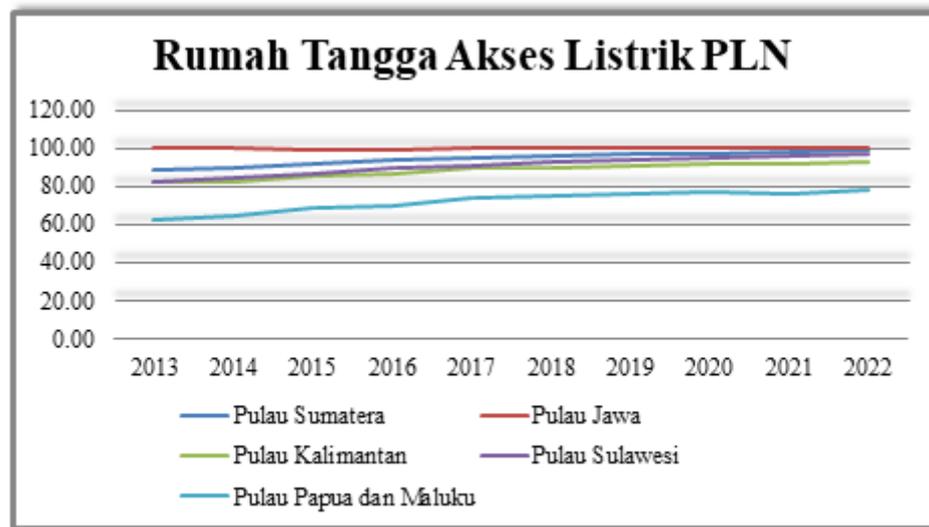


Sumber: Open Data PUPR, Data Diolah

Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan 5 Pulau Tahun 2013-2022

Data dilihat dari grafik bahwa kondisi jalan yang baik atau kualitas jalan mengalami fluktuatif dan cenderung menurun di masing-masing pulau. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan infrastruktur di setiap wilayah. Studi yang dilakukan oleh Sukwika (2018) mengatakan bahwa perbedaan dalam penyerapan investasi dan kesenjangan infrastruktur menjadi penyebab kesenjangan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, seharusnya salah satu cara menekan ketimpangan ialah pembangunan ekonomi melalui penyediaan infrastuktur yang baik. Semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada, nantinya akan mendorong tingkat produktivitas masyarakat dan berdampak pada peningkatan juga pemerataan ekonomi. Selain infrastruktur jalan, contoh lainnya dari infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas perekonomian adalah jaringan listrik. Listrik adalah energi yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan masyarakat sehari-hari yang akan menunjang aktivitas perekonomian seperti kegiatan produksi, sosial dan pemerintahan. Pulau-pulau dalam penelitian merupakan lima pulau yang mempunyai penduduk yang

padat sehingga menjadi pulau dengan pemakaian listrik yang besar pula. Pemakaian listrik pulau-pulau di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun, ketersediaan infrastruktur akses listrik dapat dilihat melalui presentase berikut.



Sumber.: Badan Pusat Statistik (BPS), Data Diolah

Gambar 1. 4 Rumah Tangga yang Mendapat Akses Listrik 5 Pulau Tahun 2013-2022

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa rata-rata mendapatkan akses jaringan listrik cenderung meningkat di pulau-pulau tersebut. Pulau Jawa menjadi pulau paling tinggi dalam penyediaan infrastruktur mengakses listrik, sedangkan Pulau Papua menjadi pulau yang paling rendah. Studi yang dilakukan oleh Iqbal, Rifin, & Juanda (2019) mengatakan ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh aliran listrik. Ini menunjukkan bahwa pasokan listrik suatu wilayah membantu meningkatkan arus perekonomian wilayah. Jika infrastruktur menurun, hal ini akan menyebabkan kegiatan produksi yang menurun dan berdampak memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, guna meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, perlu dikembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yang lebih merata.

Ketersediaan energi listrik penting dalam memperlancar aktivitas masyarakat dalam kegiatan produksi dan perekonomian lainnya.

Jumlah penduduk adalah komponen tambahan yang memengaruhi ketimpangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi selalu terkait erat dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk menjadi elemen kunci dalam aktivitas ekonomi dan dalam upaya membangun perekonomian. Penduduk menyumbangkan tenaga kerja, keahlian, kepemimpinan, serta berperan sebagai pengusaha dalam menciptakan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengelola populasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Iqbal, Tanjung, & Supriono, 2017).

Menurut Ademan dan Moris (2004), laju pertumbuhan penduduk tinggi akan menghasilkan peningkatan jumlah penduduk tetapi pendapatan per kapita menurun. Meskipun jumlah penduduk yang besar bukanlah faktor penyebab keterbelakangan pembangunan, jumlah penduduk juga merupakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan ekonomi di suatu wilayah (Indris, Kamal, 2014). Jika jumlah penduduk mampu meningkatkan kualitas serta produktivitas individu akan meningkatkan kegiatan perekonomian, sehingga jumlah penduduk dianggap sebagai aset modal. Namun, jika jumlah penduduk yang besar mempunyai struktur belanja daerah yang rendah, jumlah penduduk dianggap sebagai beban pembangunan (Devita, Delis, & Junaidi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Bustam Anggun Pamiati (2021) menyatakan bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan, hal ini dapat terjadi ketika ada ketidakmerataan dalam persebaran

jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah yang tidak memiliki lebih banyak kesempatan kerja, maka akan menyebabkan semakin tinggi angka pengangguran yang akan menyebabkan ketimpangan semakin meningkat (Fulgsang, 2013).

Pengurangan ketimpangan telah menjadi komitmen dalam upaya menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa isu ketimpangan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Penulis memilih komponen yang memengaruhi ketimpangan pembangunan berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan berdasarkan masalah yang ada, yaitu tingkat pendidikan, infrastruktur dan jumlah penduduk. Melalui tingkat pendidikan, infrastruktur serta jumlah penduduk sebagai faktor yang memengaruhi tingginya ketimpangan pembangunan pulau-pulau di Indonesia menjadi masalah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Infrastruktur dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pembangunan 5 Pulau di Indonesia”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Apakah ditemukan pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan pulau-pulau periode 2013-2022

2. Apakah ditemukan pengaruh antara infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan pulau-pulau periode 2013-2022
3. Apakah ditemukan pengaruh antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan pulau-pulau periode 2013-2022

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam rumusan masalah yang telah dibahas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi ketimpangan pembangunan pulau-pulau tahun 2013-2022.
2. Mengkaji bagaimana infrastruktur memengaruhi ketimpangan pembangunan pulau-pulau tahun 2013-2022.
3. Mengkaji bagaimana jumlah penduduk memengaruhi ketimpangan pembangunan pulau-pulau tahun 2013-2022.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, semoga hasil dapat menambah ilmu tentang penyebab yang memengaruhi ketimpangan pembangunan dan mampu menjadi tambahan referensi sebagai dasar pengembangan guna menindaklanjuti penelitian sejenis.
2. Secara praktis, semoga hasil penelitian ini menjadi ilmu tambahan untuk sarana pembelajaran khususnya dibidang ekonomi terkait ketimpangan pembangunan dan semoga sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan menghadapi permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.